

ABSTRAK

Izin lingkungan atau dokumen lingkungan sangat berperan penting dalam legalitas suatu usaha. AMDAL, UKL-UPL dan SPPL merupakan prasyarat dalam penerbitan suatu izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sangat perlu dilakukan guna sebagai pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah metode exploratoris deskriptif yuridis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Kegiatan usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep yang beroperasi tidak dilengkapi dokumen pendukung lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL termasuk ke dalam pelanggaran. Hal itu dibuktikan dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dari 971 pelaku usaha tambak udang, hanya 24 yang memiliki dokumen lingkungan. Dan hal tersebut tidak ada penegakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum.

Kata Kunci: **Tambak Udang, AMDAL, Penegakan Hukum**

ABSTRACT

Environmental permits or environmental documents play an important role in the legality of a business. AMDAL, UKL-UPL and SPPL are prerequisites for issuing an environmental permit, as stipulated in Law Number 3/2009 concerning Environmental Protection and Management. A study of the significant impact of a planned business or activity on the environment really needs to be carried out in order to make decisions regarding the implementation of a business or activity.

This research is an empirical research, with the approach used is exploratory juridical descriptive method, using primary and secondary data sources, data obtained through observation and interviews, the method used is qualitative analysis.

Shrimp pond business activities in the operating area of Sumenep Regency which are not equipped with environmental supporting documents such as AMDAL, UKL-UPL, or SPPL are included in the violation. This is evidenced by data from the Department of Environment and the Department of Fisheries, out of 971 shrimp pond business actors, only 24 have environmental documents. And there is no further enforcement from law enforcement officials.

Keywords: *Shrimp Ponds, AMDAL, Law Enforcement*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Lokasi Penelitian	11
1.6.4 Sumber Data Penelitian	11
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.6 Analisis Data	14
1.6.7 Sistematikan Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN.....	16
2.1 Analisis Dampak Lingkungan	16
2.2 Baku Mutu Lingkungan Hidup.....	20
2.3 Izin Lingkungan.....	26
2.4 UKL & UPL	29
2.5 Teori Penegakan Hukum	32
2.6 Penegakan Hukum Lingkungan	35
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA TAMBAK UDANG YANG TIDAK MEMILIKI AMDAL DI WILAYAH KABUPATEN SUMENEP.....	41
3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
3.2 Penegakan Hukum Usaha Tambak Udang Yang Tidak Memiliki AMDAL di Wilayah Kabupaten Sumenep	43
3.3 Implementasi AMDAL Dalam Usaha Tambak Udang Di Wilayah Kabupaten Sumenep.....	49

BAB IV	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan.....	64
4.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		70

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya	1
Tabel 2: Jenis usaha dan/kegiatan tambak udang yang telah memiliki dokumen UPL-UKL/SPPL	49
Tabel 3: Jumlah Pembudidaya udang di Wilayah Kabupaten Sumenep.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|---|
| Lampiran 1. | Kuesioner Penelitian untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep |
| Lampiran 2. | Kuesioner Penelitian untuk Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep |
| Lampiran 3 | Kuesioner Penelitian untuk Satpol PP Kabupaten Sumenep |
| Lampiran 4 | Kuesioner Penelitian untuk Pemilik Tambak Udang di Wilayah Kabupaten Sumenep |
| Lampiran 5 | Kuesioner Penelitian untuk masyarakat sekitar wilayah Usaha Tambak Udang Di Kabupaten Sumenep |